

LAPORAN KINERJA

2023



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 63 KELURAHAN LIMA PULUH KOTA

WEBSITE : WWW.HTTPS://SETWAN.BATUBARAKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat semoga dapat menjadi tolak ukur perencanaan, pencapaian program kinerja, sasaran dan pencapaian tujuan pada tahun yang akan datang.

Lima Puluh 15 Januari 2023


Plt Sekretaris DPRD
Kabupaten Batu Bara

AZHAR, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19780416 201001 1 016

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	7
1.5 Landasan Hukum.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Perencanaan Strategis.....	11
2.2 Pernyataan Visi dan Misi.....	12
2.3 Rencana Kerja Tahun 2023	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III AKUNTABILITAS.....	19
3.1 Capaian Organisasi	19
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	38
BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan lembaga legislatif yang berkedudukan di kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat DPRD yang berperan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan. Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan. Untuk memonitor tugas dan peran Sekretariat DPRD, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem yang dapat mengukur kinerja Sekretariat DPRD. Sistem tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan yang baik, Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan

peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingindicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, diantaranya:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara selama Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;

- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2021 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.
- b. Aspek Manajemen Kinerja yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Aspek penerapan SAKIP yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023, adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yaitu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Batu Bara. Dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Keuangan.

- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD
- c. Mendukung Pelaksanaan dan Fungsi DPRD.
- d. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
- e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.3.2 Susunan Organisasi Tata Kerja

Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Permendagri Nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini telah terakomodir dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Batu Bara No. 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Batu Bara.

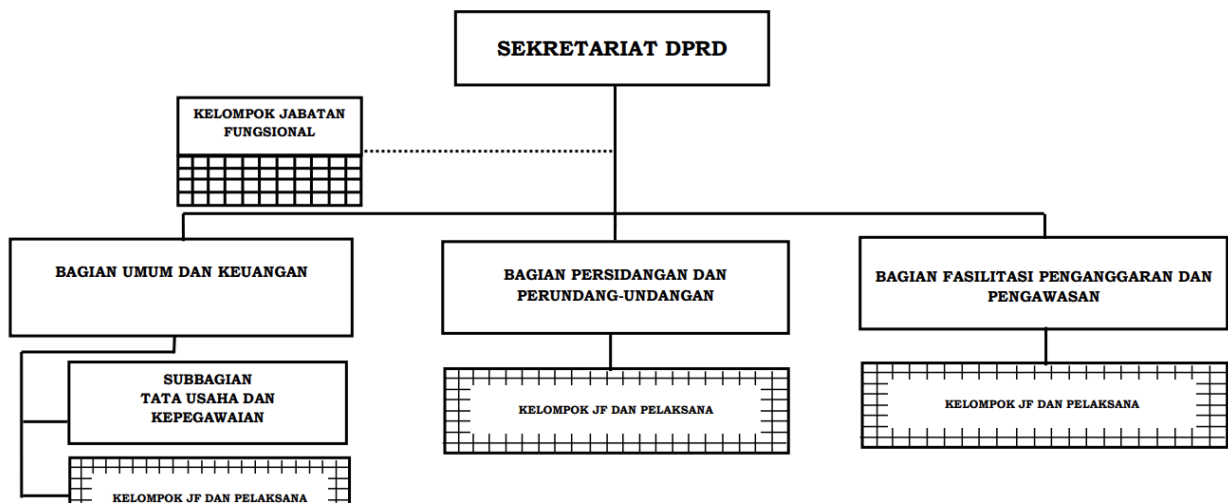
Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memenuhi tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 1 kasubbag dan 8 Ketua tim substansi, sebagai berikut:

- 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan:**
 - a. Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Ketua Tim Substansi Program dan Keuangan
 - c. Ketua Tim Substansi Rumah Tangga
- 2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan:**
 - a. Ketua Tim Substansi Kajian perundang-undangan
 - b. Ketua Tim Substansi Persidangan dan Risalah
 - c. Ketua Tim Substansi Humas, Protokol dan Publikasi
- 3. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan:**
 - a. Ketua Tim Substansi Fasilitas Penganggaran
 - b. Ketua Tim Substansi Fasilitas Pengawasan

c. Ketua Tim Substansi Kerjasama dan Aspirasi

Selanjutnya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



1.3.3 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.3.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan maka dibutuhkan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi dan merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai

tujuannya. Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan
Di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara 2023

NO	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
1	Pengatur Muda	II a	1 Orang
3	Pengatur	II c	2 Orang
5	Penata Muda	III a	8 Orang
6	Penata Muda TK.I	III b	2 Orang
7	Penata	III c	6 Orang
8	Penata TK.I	III d	2 Orang
9	Pembina	IV a	2 Orang
10	Pembina TK.I	IV b	1 Orang
Jumlah			24 Orang

Sumber : Sekretariat DPRD

Dari data diatas PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 Berdasarkan Golongan/Ruang, golongan terbanyak adalah golongan III sebanyak 18 (delapan belas) orang kemudian diikuti oleh golongan II sebanyak 3 (tiga) orang, golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan
Di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Nomor	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretaris				1	1
2	Kepala Bagian				1	1
3	Ketua Tim Substansi				2	2
4	Staff/Pelaksana	3	2	15		20
Total						24

Sumber : Sekretariat DPRD

Tingkat Pendidikan PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 terdiri dari jenjang SLTA/Sederajat sebanyak 3 (tiga) orang, Diploma III sebanyak 2 (dua) orang, Strata 1 sebanyak 15 (lima belas) orang dan Strata 2 sebanyak 4 (Empat) orang.

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Eselon Di Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara

Nomor	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Kepala Sub Bagian	1
4	Ketua Tim Susbtansi	8
5	Staff/Pelaksana	11
Total		24

Sumber : Sekretariat DPRD

Jumlah PNS yang menduduki eselon di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 terdiri dari eselon II Sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang, kepala sub bagian sebanyak 1 orang, ketua substansi sebanyak 8 orang dan pelaksana sebanyak 11 orang.

1.4 Isu Strategis

Isu-isus strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Pemahaman yang berbedaan antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
4. Keterlambatan penyampaian materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan.

1.5 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batu Bara.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, landasan hukum dan sistematika penyusunan LkjIP Sekretariat DPRD Batu Bara tahun anggaran 2023.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi LkjIP .

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LkjIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LkjIP

C. Gambaran umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Sekretariat DPRD Batu Bara mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LkjIP

E. Sistematika Penulisan

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LkjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023.

- A. Perencanaan Strategis
- B. Pernyataan Visi dan Misi
- C. Perencanaan Kerja tahun 2023
- D. Perjanjian Kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan kinerja sasaran setrategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan di organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Sestrategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan Dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Batu Bara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Penetapan jangka waktu lima tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Sestrategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 dengan melibatkan *stakeholder* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD maupun Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dengan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan selama satu tahun.

2.2 Pernyataan Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023 ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara yaitu:

“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang sejahtera, mandiri, dan Berbudaya”

Dan untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut diatas, dijabarkan 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan Investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya;
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara;
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang mana dengan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut pelaksanaan program-program pembangunan akan lebih terarah, efektif dan efisien. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pembangunan yaitu Visi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara pada Kurun waktu 5 (Lima) tahun dapat tercapai. Sesuai dengan peraturan Bupati Batu Bara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terdapat misi-misi Pembangunan diantaranya adalah misi ke-1 “Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”

Tabel 2.1 Misi, Tujuan Daerah, dan Sasaran Daerah yang Menjadi Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara

Visi :	Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berbudaya		
Misi I:	Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintahan atas Pelayanan Publik dan Investasi		
TUJUAN	SASARAN	Stategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dengan memberikan pelatihan/bimtek	Meningkatkan kapasitas, integritas dan profesionalisme aparatur
	Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batu Bara	Meningkatkan profesionalisme aparatur	
	Meningkatkan tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batu Bara	Menyusun pedoman/juknis tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batu Bara	

Sumber : Sekretariat DPRD

2.3 Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja merupakan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan SKPD dalam rangka menindaklanjuti Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023, Sekretariat DPRD mengampu 2 Program, 13 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan. Adapun Program Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Anggaran
Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara	SEKRETARIAT DPRD			52,650,479,163
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	70,85	32,747,511,644
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10,000,000
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	7,000,000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	3,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18,891,204,971
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62 Orang	18,721,774,971
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	154,280,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	8,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Laporan	7,150,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,748,300,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	2 Paket	91,800,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27 Orang	1,656,500,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6,052,228,757
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Apket	74,019,202
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	1,925,280,860
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	1,182,510,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	67,118,695
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	2 Dokumen	150,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	2,653,300,000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	30,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	30,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,043,998,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	22,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Laporan	427,798,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1,594,200,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,509,427,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	621,521,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit	67,500,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitas	4 Unit	501,300,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	132 Unit	319,106,000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	540,750,000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian dinas dan atribut DPRD	4 Paket	348,250,000
	Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	35 Orang	192,500,000
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	1,921,602,916
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	4 Laporan	628,460,437
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	3 Paket	1,293,142,479
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			19,902,967,519
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah	100%	170,803,388
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	1 Dokumen	12,823,470

	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	1 Dokumen	11,923,470
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	146,056,448
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	271,558,354
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	9,787,347
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	8,987,347
	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1 Dokumen	20,868,305
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	1 Dokumen	20,868,305
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	211,047,050
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	210,594,085
	Pengawasan Tindak Lanjut Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	210,594,085
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	2,036,673,642
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	1 Dokumen	759,218,459
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	19 Orang	570,000,000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	10 Orang	210,000,000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	6 Dokumen	208,042,272
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 Dokumen	289,412,911
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	2,554,388,050
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 Dokumen	2,554,388,050
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	349,400,000

	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan dokumentasi dan publikasi	4 Dokumen	349,400,000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	14,309,550,000
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	2 Dokumen	14,309,550,000

Sumber : Sekretariat DPRD

2.4 PERJANJIAN KINEJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja 2023 adalah suatu Pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam tahun 2023. Adapun sasaran setrategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70,85
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%
Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29,982,493,149	Mendukung Sasaran Strategis I
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15,137,660,711	Mendukung Sasaran Strategis II

Sumber : Sekretariat DPRD

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Sekretaris DPRD berkomitmen kepada Bupati Batu Bara untuk mewujudkan 2 sasaran kinerja dengan masing-masing indikatornya. Sasaran kinerja tersebut didukung oleh 2 Program yang alokasi anggarannya sebesar Rp. 45.120.153.860. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 29,982,493,149; mendukung Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan sasaran nilai sakip dan program Dukungan

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 15,137,660,711 mendukung terwujudnya kinerja lembaga Legislatif yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat belanja-belanja yang belum terakomodir oleh APBD ataupun belanja yang bukan menjadi prioritas untuk mencapai sasaran kinerja. Karenanya, besar kemungkinan terjadi perubahan baik itu perubahan target indikator kinerja, atau pun pagu APBD yang dialokasikan untuk setiap Perangkat Daerah, tak terkecuali untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja perubahan yang mana pagu anggaran programnya dialokasikan berdasarkan Perubahan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2023 Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70,85
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%
Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32,747,511,644	Mendukung Sasaran Strategis I
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19,902,967,519	Mendukung Sasaran Strategis II

Sumber : Sekretariat DPRD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Batu Bara.

Penguatan Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, maka capaian kinerja Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	Jumlah Prolegda yang disepakati bersama Eksekutif dibagi jumlah Prolegda yang dibahas bersama Eksekutif

Sumber : Sekretariat DPRD

Dengan pelaksanaann sasaran-sasaran tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) program kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2023

Adapun yang capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara untuk tahun anggaran 2023 dengan 2 sasaran strategis, diantaranya:

Tabel 3.2
Capaian dan Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70,85	71,10	100,3
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%	47%	47%

Sumber : Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator kinerja dengan capaian Nilai Akip sebesar 100,3%. Sedangkan

capaian untuk sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara sebesar 47%.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Dengan Tahun Lalu Dan Target Jangka Menengah

Adapun perbandingan atas capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun lalu dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2019-2023
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah dari Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Akip	65,50 (B)	65,60 (B)	65,95 (B)	68,50 (B)	70,85 (BB)	65,50 (B)	65,95 (B)	65,95 (B)	70,31 (BB)	70,85 (BB)	100%	100%	100%	103%	100,3%
2	Persentase Prolegda yang disepakati bersama Eksekutif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	47%	100%	100%	100%	83%	47%

Sumber : Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja mengalami kenaikan pada mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan untuk sasaran strategis II yakni Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara mengalami penurunan atas capaian dari tahun 2022 dan tahun 2023 dengan berbagai faktor penyebab tidak tercapainya atas target tersebut.

SASARAN 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 1 “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*” diukur berdasarkan pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sasaran I Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70,85	71,10	100,3

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Batu Bara

Capaian Indikator kinerja “Nilai AKIP” Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara adalah nilai (BB), sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2023 yaitu nilai BB Sehingga Persentase Pencapaian pada indikator ini sebesar 100,3%. Dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Nilai Evaluasi Akip Sekretariat DPRD Tahun 2022-2023

No.	Kriteria Penilaian	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Nilai Maksimal	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Maksimal	Nilai Evaluasi AKIP
			2022		2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24.09	30	25.4
2	Pengukuran Kinerja	25	18.14	30	19.9
3	Pelaporan Kinerja	15	11.08	15	9.8
4	Evaluasi Kinerja	10	17	25	16
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20			
Nilai Total		100	70.31	100	71.10

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Batu Bara

Capaian Indikator kinerja “Nilai AKIP” Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara adalah nilai (BB), sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan nilai 71,10 (BB) Sehingga Persentase Pencapaian pada indikator ini sebesar 100,3% dengan peningkatan nilai sebesar 0,79 dengan persentase sebesar 1,12% dibandingkan dengan capaian nilai AKIP tahun 2022 pada Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara.

Adapun yang menjadi kelemahan atas indikator capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara, diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 12,8 dengan nilai maksimal 15, dengan catatan diantaranya :

- a. Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi yang berkaitan (crosscutting);
 - b. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan namun belum tepat waktu;
2. Pengukuran kinerja memperoleh nilai 8,7 dengan nilai maksimal 15, dengan catatan diantaranya :
 - a. Pengumpulan data kinerja belum menggunakan mekanisme yang jelas (SOP pengumpulan data kinerja belum ada)
 - b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
 - c. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
 - d. Pengukuran kinerja memperngaruhi perubahan aktivitas namun tidak terdokumentasi (tidak ada dokumen rencana aksi).
3. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 4,7 dengan nilai maksimal 7,5 dengan catatan, diantaranya :
 - a. Laporan kinerja belum seluruhnya sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014;
 - b. Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - c. Laporan kinerja tidak mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - d. Laporan kinerja belum mencantumkan hambatan/upaya nyata dalam pencapaian kinerja;
 - e. Laporan kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya maupun efisiensi penggunaan anggaran;
 - f. Laporan kinerja belum mencantumkan upaya perbaikan untuk penyempurnaan kinerja;
 - g. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja interbal dengan memperoleh nilai 6,3 dengan nilai maksimal 12,5 dengan catatan, diantaranya :

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi;
- b. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya, belum seluruhnya ditindaklanjuti;
- c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Peningkatan kompetensi pegawai pada bidang perencanaan dan sinergisitas pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara berdampak positif terhadap dokumen perencanaan yang semakin baik selain itu keinginan kuat pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk dapat menambah wawasan serta membaca dan mempelajari peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, selain itu Sekretariat DPRD Batu Bara menerapkan prinsip keterbukaan atas dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada website Sekretariat DPRD.

Selain itu adapun yang menjadi hambatan dalam pencapaian atas nilai maksimal daripada evaluasi SAKIP diantaranya belum adanya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung kinerja pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan selain itu kuantitas sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam menjalankan tugas yang diberikan selain itu kompetensi sumber daya manusia yang masih belum optimal sehingga berpengaruh atas pencapaian target kinerja dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pada indikator pengukuran kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis II

Meningkatkan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten BatuBara

Pencapaian sasaran II *“Meningkatkan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara”* diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6
Sasaran II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%	47%	47%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Berdasarkan Data dari Bagian Kajian Persidangan dan Perundang-Undangan terdapat 15 (Lima Belas) Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Eksekutif yang terdiri dari 12 (dua belas) dan 3 (tigas) Ranperda Legislatif/Insiatif dengan sebanyak 6 Ranperda yang tidak dilaksanakan, 2 Ranperda yang tidak disahkan dan 7 Ranperda yang disahkan sehingga dapat diketahui bahwa capaian persentase prolegda yang disepakati bersama Eksekutif sebanyak 7 Ranperda.

Jika dibandingkan dengan Pencapaian Tahun 2022 sebesar 83% maka terjadi penurunan sebesar 36% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena Ranperda Yang disahkan, diantaranya:

1. Ranperda Pajak dan retribusi daerah
2. Ranperda penyelenggaraan perlindungan anak
3. Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022
4. Ranperda tentang perubahan atas perda kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. Bahtera Berjaya
5. Ranperda tentang perubahan atas perda kabupaten Batu Bara Nomor 1 tahun 2019 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Batu Bara kepada Perumda Tirta Tanjung
6. Ranperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023
7. Ranperda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.

Adapun ranperda yang tidak dilaksanakan dan hambatan tidak terlaksanakannya ranperda tersebut diantaranya:

1. Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penyebab ranperda tidak diparipurnakan disebabkan oleh harus adanya sinkronisasi dengan Perda dan Perbup Kabupaten Batu Bara yang berkaitan dengan Ranperda yang dimaksud.
2. Ranperda budaya mengaji. Belum dapat diparipurnakan yang disebabkan belum diputuskan OPD pengusul ranperda tersebut.
3. Ranperda kawasan tanpa rokok. Belum dapat diparipurnakan sehubungan dengan draf yang belum siap
4. Ranperda penanggulangan bencana. Tidak dilaksanakan disebabkan oleh tidak adanya anggaran di OPD untuk membahas ranperda tersebut.
5. Ranperda tentang pengelolaan masyarakat di wilayah pesisir
6. Ranperda penyelenggaraan lanjut usia

Adapun ranperda yang tidak disahkan diantaranya:

1. Ranperda penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha berbasisi resiko.
2. Ranperda perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Capaian kinerja sasaran/indikator kinerja diatas diperoleh melalui capaian kinerja pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Batu Bara selama tahun 2023, termasuk pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa capaian kinerja atas masing-masing program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Batu Bara pada tahun 2023 dengan terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota diukur dengan menggunakan indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan rincian kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Output Kegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74
9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100
Rata-rata capaian kinerja Program I			95.1

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 kegiatan yang tidak mencapai target yakni pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yakni hanya mencapai 74% dengan target 100%, adapun rincian capaian atas kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota diantaranya:

1. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada kegiatan ini menggunakan indikator Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

Tabel 3.7.1
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

2. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada kegiatan ini menggunakan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.2
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	62	62	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada kegiatan ini menggunakan indikator kinerja persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.3
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	Paket	2	2	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	27	27	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada kegiatan ini menggunakan indikator kinerja persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7.4
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	5	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dokumen	2	2	100%

	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

5. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.5
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

6. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.6
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	4	4	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	2	2	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

7. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7.7
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	8	89%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	8	89%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitas	Unit	4	2	50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	132	132	100%
Capaian Kegiatan					82%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

8. Pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan indikator kinerja persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.8
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian dinas dan atribut DPRD	Paket	5	5	100%

Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	35	17	49%
Capaian Kegiatan					74%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

9. Pada kegiatan Layanan administrasi DPRD dengan indikator kinerja persentase Layanan administrasi DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.9
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket	3	3	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Pada pelaksanaan kegiatan program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri dari 9 kegiatan tahun anggaran 2023, dalam pelaksanaanya menerapkan prinsip efisiensi atas penggunaan anggaran namun tetap memprioritaskan hasil kinerja yang telah ditetapkan, sebagai wujud efisiensi atas penggunaan anggaran seperti pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan kegiatan lainnya.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diukur dengan menggunakan indikator persentase prolegda yang disepakati bersama Eksekutif, yang terdiri dari 7 kegiatan dengan rincian kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7.10
Capaian Output Kegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah	100
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentanse Pembahasan Kebijakan Anggaran	100
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	97
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100
6	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	60
7	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100
Rata-rata capaian kinerja Program II			93.9

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 kegiatan yang tidak mencapai target yakni pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dan kegiatan layanan keuangan dengan capaian 97% dan Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan capaian 60%, adapun rincian capaian atas kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diantaranya:

1. Pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan indikator kinerja persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.11
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Dokumen	1	1	100%

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Dokumen	1	1	100%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

2. Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan indikator kinerja persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.12
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

3. Pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kinerja persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.13
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pengawasan Tindak Lanjut Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

4. Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan indikator kinerja persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7.14
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Dokumen	1	1	100%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	19	19	100%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Orang	10	10	100%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	Dokumen	6	5	83%
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					97%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

5. Pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan indikator kinerja persentase terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7.15
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Dokumen	3	3	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

6. Pada kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerahdengan indikator kinerja persentase terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7.16
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan dokumentasi dan publikasi	Dokumen	5	3	60%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

7. Pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan indikator kinerja persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7.17
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Dokumen	2	2	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Pada pelaksanaan kegiatan program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri dari 7 kegiatan tahun anggaran 2023, dalam pelaksanaanya menerapkan prinsip efisiensi atas penggunaan anggaran namun tetap memprioritaskan hasil kinerja yang telah ditetapkan, seperti pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Adapun realisasi anggaran tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara, sebagai Berikut :

Tabel 3.8
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akip	nilai	70.85	32,747,511,644	nilai	71.10	31,718,135,437	Nilai	100.35	96.86
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	10,000,000	%	100	9,825,000	%	100	98.25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	7,000,000	dokumen	1	6,825,000	dokumen	100	97.50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	1	3,000,000	dokumen	1	3,000,000	dokumen	100	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	18,891,204,971	%	100	18,757,373,041	%	100	99.29

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	62	18,721,774,971	bulan	62	18,587,943,141	Orang	62	99.29
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	154,280,000	Dokumen	1	154,280,000	Dokumen	100	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2	8,000,000	Laporan	2	7,999,900	Laporan	100	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	2	7,150,000	Laporan	2	7,150,000	Laporan	100	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	1,748,300,000	%	100	1,743,228,251	%	100	99.71
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	Paket	2	91,800,000	Paket	2	90,855,000	Paket	100	98.97
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	27	1,656,500,000	Orang	27	1,652,373,251	Orang	100	99.75
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	6,052,228,757	%	100	5,721,405,293	%	100	94.53

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	74,019,202	paket	1	74,018,631	paket	100	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	1,925,280,860	Paket	5	1,923,512,352	Paket	100	99.91
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	1,182,510,000	paket	2	943,450,000	paket	100	79.78
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	67,118,695	paket	1	66,475,000	paket	100	99.04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	dokumen	2	150,000,000	dokumen	2	112,483,000	dokumen	100	74.99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	2	2,653,300,000	laporan	2	2,601,466,310	laporan	100	98.05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	30,000,000	%	100	30,000,000	%	100	100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	30,000,000	Unit	1	30,000,000	Unit	100	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2,043,998,000	%	100	1,883,568,750	%	100	92.15

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	22,000,000	Laporan	1	22,000,000	Laporan	100	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	5	427,798,000	Laporan	5	367,368,750	Laporan	100	85.87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	1	1,594,200,000	Laporan	1	1,494,200,000	Laporan	100	93.73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1,509,427,000	%	82	1,216,985,307	%	82	80.63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	621,521,000	Unit	8	559,768,600	Unit	89	90.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	67,500,000	Unit	8	63,484,707	Unit	89	94.05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitas	Unit	4	501,300,000	Unit	2	276,885,500	Unit	50	55.23
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	132	319,106,000	Unit	132	316,846,500	Unit	100	99.29

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	540,750,000	%	74.29	441,401,750	%	74	81.63
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian dinas dan atribut DPRD	Paket	5	348,250,000	Paket	5	347,901,750	Paket	100	99.90
Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	35	192,500,000	Orang	17	93,500,000	Orang	49	48.57
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	100	1,921,602,916	%	100	1,914,348,045	%	100	99.62
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Laporan	1	628,460,437	Laporan	1	625,229,829	Laporan	100	99.49
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket	3	1,293,142,479	Paket	3	1,289,118,216	Paket	100	99.69
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PROLEGDA YANG DISEPAKATI BERSAMA EKSEKUTIF	%	100%	19,902,967,519	%		19,350,647,996	%	-	97.22
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	170,803,388	%	100	170,115,172	%	100	99.60
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Dokumen	1	12,823,470	Dokumen	1	12,135,254	Dokumen	100	94.63
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Dokumen	1	11,923,470	Dokumen	1	11,923,470	Dokumen	100	100.00

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	1	146,056,448	Dokumen	1	146,056,448	Dokumen	100	100.00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	271,558,354	%	100	271,205,832	%	100	99.87
Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	1	9,787,347	Dokumen	1	9,787,347	Dokumen	100	100.00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	1	8,987,347	Dokumen	1	8,987,347	Dokumen	100	100.00
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1	20,868,305	Dokumen	1	20,868,305	Dokumen	100	100.00
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	Dokumen	1	20,868,305	Dokumen	1	20,595,783	Dokumen	100	98.69
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	211,047,050	Dokumen	1	210,967,050	Dokumen	100	99.96
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	210,594,085	%	100	210,465,085	%	100	99.94
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	1	210,594,085	dokumen	1	210,465,085	dokumen	100	99.94
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	2,036,673,642	%	96.67	1,936,653,510	%	97	95.09

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Dokumen	1	759,218,459	Dokumen	1	758,462,995	Dokumen	100	99.90
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	19	570,000,000	Orang	19	560,000,000	Orang	100	98.25
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Orang	10	210,000,000	Orang	10	180,000,000	Orang	100	85.71
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan hubungan masyarakat	dokumen	6	208,042,272	dokumen	5	151,931,604	dokumen	83	73.03
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	Dokumen	1	289,412,911	Dokumen	1	286,258,911	Dokumen	100	98.91
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	2,554,388,050	%	100.00	2,401,160,403	%	100	94.00
Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Dokumen	3	2,554,388,050	Dokumen	3	2,401,160,403	Dokumen	100	94.00
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	%	100	349,400,000	%	60.00	212,800,000	%	60	60.90
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan dokumentasi dan publikasi	Dokumen	5	349,400,000	Dokumen	3	212,800,000	Dokumen	60	60.90
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	14,309,550,000	%	100.00	14,148,247,994	%	100	98.87
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Dokumen	2	14,309,550,000	Dokumen	2	14,148,247,994	Dokumen	100	98.87

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 52,650,479,163; dengan penyerapan anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yakni sebesar Rp.51,068,783,433; dengan jumlah anggaran tidak terserap yakni Rp. 1,581,695,730; atau dapat dikatakan bahwa persentase penyerapan sebesar 97% atas pelaksanaan terhadap 16 kegiatan pada Sekretariat DPRD.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai media pelaporan atas amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah serta hambatan selama dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Batu Bara dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Batu Bara tahun anggaran 2023, yang telah tercapai atas 2 sasaran organisasi dengan 2 indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja untuk capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator nilai SAKIP, Sekretariat DPRD Batu Bara mencapai nilai 71.10 atau nilai BB dengan kategori sedang, dan capaian sasaran kinerja meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator persentase prolegda yang disepakati bersama Eksekutif memperoleh nilai 47% dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD atas rancangan peraturan daerah yang masuk.

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Batu Bara senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan secara terus menerus pada tahun yang akan datang serta diupayakan agar sasaran kinerja organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Lima Puluh, 15 Januari 2024
Pjt SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATU BARA

AZHAR, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19780416 201001 1 016